

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA
TAHUN 2023**



**Jl Raya Mranggen No. 200 Mranggen Demak
TELEPON: (024)6710026**



PENJELASAN UMUM

Berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, maka PT. BPR Artha Mranggenjaya merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2022 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dengan penjelasan bahwa :

- a. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggung jawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Penerapan Tata Kelola tersajikan sebagai berikut :

POKOK-POKOK ISI LAPORAN

Mengacu pada Pasal 75 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan SE OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.



LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA
Alamat	JI Raya Mranggen No. 200 Mranggen Demak
Nomor Telepon	(024)6710026
Posisi Laporan	31 Desember 2023
Peringkat Komposit	(Tidak ada peringkat komposit)
Predikat Komposit	(Tidak ada predikat komposit)
Kesimpulan / Penjelasan	(Tidak ada kesimpulan / penjelasan)

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	M. Zakky Faesal, ST
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi : Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain : a) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b) Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR. c) Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : <ul style="list-style-type: none">• Fungsi Audit Intern• Fungsi Manajemen Risiko, dan• Fungsi Kepatuhan e) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya. f) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya : <ul style="list-style-type: none">• Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional.• Penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independent terhadap unit kerja lain. g) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. h) Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. i) Menyediakan data dan informasi akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		
2.	Nama	:	Agus Nurwibowo, SE
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas & Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sbb : 1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi		



- seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain.
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain.
 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
 5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
 6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.
 7. Memutuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank.
 8. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 9. Menetapkan sistem prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank.
 10. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
 11. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan atau keputusan yang diambil Direksi bank tidak menyimpang dari Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi Kepatuhan.
 13. Melakukan hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Direksi telah menjalankan tugas operasional BPR, secara umum telah menindak lanjuti rekomendasi Dewan Komisaris dan hasil temuan audit internal dan eksternal, yang antara lain :

- Perbaiki KAP untuk mendorong TKS bank menjadi lebih baik
- Perhatikan administrasi
- Perhatikan analisa kredit

Penjelasan Lebih Lanjut :

Selain itu Direksi harus tetap memperhatikan :

- Upaya-upaya penanganan kredit bermasalah
- Menjaga kualitas kredit, dan
- Melaksanakan SOP dengan baik.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Antonius Andy Wibowo
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris : Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan saran-saran kepada Direksi. 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan merekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern 			



BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya.	
2.	Nama : DR. Gregorius N. Masdjojo, M.Kom, Msi
	Jabatan : Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab :	
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris : Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain : 1) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan saran-saran kepada Direksi. 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan merekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya.	
Rekomendasi Kepada Direksi :	
Rekomendasi Dewan Komisaris dan hasil temuan audit internal dan eksternal, yang antara lain : - Tetap memperhatikan upaya-upaya penanganan kredit bermasalah - Menjaga kualitas kredit - Melaksanakan SOP dengan baik	
Penjelasan Lebih Lanjut :	
- Tanggal 10 Juli 2023 DR. Gregorius N. Masdjojo, M.Kom, Msi terakhir menjabat sebagai Komisaris di BPR Artha Mranggenjaya - Tanggal 7 Desember 2023 Bp. Susilo Winarko mengisi jabatan Komisaris di BPR Artha Mranggenjaya menggantikan posisi DR. Gregorius N. Masdjojo, M.Kom, Msi	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi	



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR tidak memiliki Anggota Komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR tidak memiliki Komite			

C. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	M. Zakky Faesal, ST	Rp0	0%
2.	Agus Nurwibowo, SE	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kedua anggota Direksi tidak memiliki saham di PT. BPR Artha Mranggenjaya			



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	M. Zakky Faesal, ST	-	-	0%
2.	Agus Nurwibowo, SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Kedua Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

D. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	M. Zakky Faesal, ST	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Agus Nurwibowo, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	M. Zakky Faesal, ST	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Agus Nurwibowo, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kedua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR				

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Antonius Andy Wibowo	Rp1.055.000.000	52.75%
2.	DR. Gregorius N. Masdjojo, M.Kom, Msi	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Komisaris Utama merupakan Pemegang Saham Pengendali pada BPR AMJ			



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DR. Gregorius N. Masdjojo, M.Kom, Msi	-	PT. BPR Hartha Muriatama	4.83%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu Dewan Komisaris memiliki saham pada perusahaan lain.				

F. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Antonius Andy Wibowo	Tidak ada	Tidak ada	Chatarina Suryati - Komisaris Utama merupakan PSP dan Putra dari salah satu pemegang saham (Ibu Chatarina Suryati)
2.	DR. Gregorius N. Masdjojo, M.Kom, Msi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris utama merupakan PSP dan putra dari salah satu pemegang saham (Ibu Chatarina Suryati)				



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Antonius Andy Wibowo	Tidak ada	Tidak ada	Chatarina Suryati - Komisaris Utama merupakan PSP dan putra dari salah satu pemegang saham (Ibu Chatarina Suryati)
2.	DR. Gregorius N. Masdjojo, M.Kom, Msi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama merupakan PSP dan putra dari salah satu pemegang saham (Ibu Chatarina Suryati)				

G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp31.000.000	2	Rp21.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp0	2	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp64.360.000	2	Rp0
Total			Rp95.360.000		Rp21.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Pada tahun 2023 ini baik anggota Direksi maupun Dewan Komisaris tidak mendapatkan Tantiem.					



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	BPJS Kesehatan (2), BPJS Ketenagakerjaan (2), Asuransi Pensiun (2)	BPJS Kesehatan (2), BPJS Ketenagakerjaan (2), Asuransi Pensiun (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
1. Anggota Direksi masing-masing mendapatkan fasilitas : - Mobil Dinas - BPJS Kesehatan - BPJS Ketenagakerjaan - Asuransi Pensiun			
2. Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas : - BPJS Kesehatan - BPJS Ketenagakerjaan - Asuransi Pensiun			

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.8 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji tertinggi dan terendah	

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	26 Januari 2023	4	Rapat bulanan : Review pemakaian BBM kendaraan operasional
2.	09 Februari 2023	4	Rapat bulanan : Pembahasan debitur-debitur



			bermasalah
3.	21 Maret 2023	2	Rapat bulanan dengan pokok bahasan : Laporan Kinerja bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023
4.	10 April 2023	4	Rapat bulanan dan monitoring persiapan RUPS 2023
5.	08 Mei 2023	4	Rapat bulanan : Pokok bahasan perkreditan
6.	06 Juni 2023	4	Rapat bulanan dan monitoring kredit
7.	06 Juli 2023	4	Rapat bulanan, Tentang : 1. Tinjauan bisnis bulan Januari - Juli 2023 2. Tinjauan keuangan Januari - Juni 2023 3. Perbandingan RBB tahun 2023 dan realisasi 4. lain-lain
8.	11 Agustus 2023	3	Rapat bulanan : Pembahasan tentang bisnis dan collection
9.	15 September 2023	3	Rapat bulanan : Diskusi tentang pajak dan operasional
10.	04 Oktober 2023	3	Rapat bulanan : pembahasan tentang bisnis & collection
11.	11 November 2023	3	Rapat bulanan & monitoring operasional
12.	27 Desember 2023	4	Rapat bulanan : 1. Tinjauan bisnis dan keuangan sampai dengan bulan Nov 2023 2. Tinjauan sampling debitur non lancar 3. Lain-lain
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan rapat dilakukan rutin tiap bulan sebanyak minimal 12 kali dalam satu tahun			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Antonius Andy Wibowo	12	0	100%
2.	DR. Gregorius N. Masdjojo, M.Kom, Msi	7	0	58.33%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
- Komisaris Utama (Antonius Andy Wibowo) : Kehadiran di BPR lebih dari 75 kali (Untuk rapat bulanan dan monitoring operasional BPR)				
- Komisaris (DR. Gregorius N. Masdjojo) : Kehadirannya di BPR lebih dari 7 kali (Untuk rapat bulanan dan monitoring operasional BPR)				



J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Pada tahun Laporan tidak ada penyimpangan.								

K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	5	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
Total	8	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
1. BPR AMJ sebagai Penggugat : ada 6 Case - Debitur : Widiyanto, Sisyanto dan Kurian di PN Purwodadi - Debitur : Masrokan, Sholikin dan Sukiswati di PN Demak 2. BPR AMJ sebagai tergugat : ada 2 case - Debitur : Musyaffak (di PN Demak) - Debitur Eko Suyetno (di PN Purwodadi)		

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							



2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil							

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	27 April 2023	Sosial	Sumbangan Peringatan HUT RI Ke-78 tahun 2023	RT.08 RW.01 Mranggen	Rp150.000
2.	01 Agustus 2023	Sosial	Sumbangan Pembangunan Masjid Baiturrohmah - Tegalmas Mranggen	Masjid Baiturrohmah - Tegalmas Mranggen	Rp200.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tidak ada sumbangan untuk kegiatan politik					

Demak, 12 Januari 2024

PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA

M. Zakky Faesal, ST
Direktur Utama

Agus Nurwibowo, SE
Direktur YMF Kepatuhan

Antonius Andy Wibowo, ST
Komisaris Utama

Susilo Winarko, SH
Komisaris